

## MEDIASI MEDIA MASSA MENUJU NILAI-NILAI BARU DALAM PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN EKONOMI PENGETAHUAN

Fit Yanuar<sup>1</sup>, Daesy Ekayanthi<sup>2</sup>, Titi Widaningsih<sup>3</sup>, Udi Rusadi<sup>4</sup>

Universitas Sahid Jakarta<sup>1,2,3</sup>

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta<sup>4</sup>

Email: fit\_yanuar@usahid.ac.id<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Pada bulan April 2023 terjadi kisruh dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia ketika Kemdikbud-Ristek RI meminta dosen-dosen Indonesia melakukan pengisian angka kredit dalam sebuah sistem informasi. Waktu yang mepet dan berlarut-larutnya persoalan administrasi kedosenan selama ini telah menimbulkan perlawanan dari dosen pada April 2023 itu, yang direspon dengan pembatalan kebijakan oleh Kemdikbud-Ristek RI. Fenomena ini menarik untuk diteliti menggunakan teori hiper-kapitalisme dan ekonomi pengetahuan dari Philip W. Graham, seorang pemikir berbasis kajian ekonomi-politik-media. Di dalam rangkaian teorinya Graham menelurkan sebuah metode analisis yang disebutnya dengan istilah *discourse historical* dimana komunikasi, bahasa, dan media massa berperan dalam sebuah proses mediasi yang akan melahirkan nilai-nilai baru. Sebagai hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa media massa telah digunakan dan mempunyai peran besar dalam proses mediasi terkait kancah ekonomi pengetahuan ala Indonesia untuk memunculkan nilai baru. Namun tetap tersisa sebuah pertanyaan apakah Kemdikbud-Ristek RI akan menelurkan sebuah kebijakan administrasi kedosenan yang benar-benar lebih memudahkan dosen-dosen Indonesia dalam berkarya di dunia pendidikan Indonesia, dan seterusnya akan membuat dinamika pendidikan Indonesia semakin baik dan semakin baik lagi.

**Kata Kunci:** Pendidikan Tinggi, Kemdikbud-Ristek RI, Philip W. Graham, Mediasi, Ekonomi Pengetahuan

### Abstract

*In April 2023 there was disorder in the world of Indonesian higher education when the Indonesian Ministry of Education and Culture asked Indonesian lecturers to fill in credit scores in an information system. The pressed deadline and protracted lecturer administration issues have led to resistance from lecturers in April 2023, which was responded by cancelling the policy by the Indonesian Ministry of Education and Culture. This phenomenon is interesting to study using the theory of hyper-capitalism and the knowledge economy of Philip W. Graham, a philosopher based on media-political-economy studies. In his series of theories, Graham spawned a method of analysis which he called discourse historical in which communication, language, and the mass media play a role in a mediation process that will produce new values. As a result of the research it can be shown that the mass media has been used and has a major role in the mediation process related to the Indonesian-style knowledge economy to create new values. However, a question remains whether the Indonesian Ministry of Education and Culture will produce a teaching administration policy that will truly make it easier for Indonesian lecturers to work in education, and so on, will make the dynamics of Indonesian education even better.*

**Keywords:** Education, Indonesia Ministry of Education-Culture-Research-Technology, Philip W. Graham, mediation, knowledge economy

### PENDAHULUAN

Pada awal sampai dengan pertengahan bulan April 2023, terjadi kekisruhan dalam pendidikan tinggi Indonesia yang terkait dengan kebijaksanaan menyangkut dosen/pengajar pada lembaga pendidikan

tinggi. Pada saat itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud-Ristek) RI lewat Lembaga Layanan Dikti sesuai lokasinya masing-masing menelurkan sebuah kebijakan yang meminta dosen untuk

mengisi angka kredit hasil kerjanya di sistem informasi SIJALI dengan mengingatkan resiko kehilangan angka kredit kinerja yang dimaksud jika tidak mengisinya sesuai batas waktu yaitu 15-4-2023 (untuk sesi pengisian oleh dosen).

Dari segi *timing* kebijaksanaan itu agak kurang tepat karena mendekati libur Idul Fitri 1444 H. Ada urutan pekerjaan, di mana setelah dosen selesai mengisinya maka pihak internal kampus yang berkewenangan harus segera memeriksa hasil pengisian oleh dosen itu, dan jika terjadi kesalahan tentu harus dilakukan revisi. Jika tidak ada kesalahan dan atau kesalahan telah diperbaiki, maka pihak kampus harus melaporkannya ke Kemdikbud-Ristek RI lewat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi masing-masing [1]. Tak dinyana, kebijakan Kemdikbud-Ristek RI ini membuat dosen bergerak melakukan perlawanan. Bagi dosen, lagi-lagi beban laporan administratif yang dimintakan oleh Kemdikbud-Ristek RI, namun kali ini dengan waktu yang mepet. Adapun perlawanan para dosen ini adalah titik kulminasi keresahan. Dosen merasa selama ini beban administrasi relatif mengganggu dosen dalam karya dan kinerja.

Terbaca dari dinamika yang terjadi pada bulan April 2024, bahwa perlawanan yang dilakukan dosen menggunakan media massa dan media sosial [2]. Inilah yang hendak dikaji dalam artikel ini. Kajian menggunakan pemikiran seorang tokoh bernama Philip W. Graham yang namanya dikenal lewat kajian ekonomi politik media.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan mediasi, yang diturunkan dari sebuah konsep berpikir yang disebut sebagai hiperkapitalisme oleh Philip W. Graham

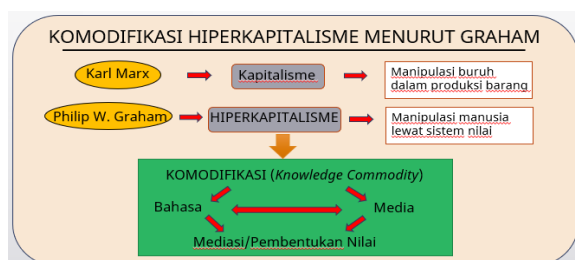
yang dia hubungkan dengan teorinya bernama ekonomi pengetahuan/*knowledge economy*.

Di dalam hiperkapitalisme, Graham menunjukkan dinamika kapitalisme masa kini di mana manusia diketahui telah menjadi komoditi (produk dagangan sesuai konteks bahasan) yang dalam ilmu komunikasi sosial dikenal dengan istilah komodifikasi [3]. Keadaan ini tercipta karena menurut Graham, kita telah dibentuk oleh kapitalisme untuk hidup dalam sebuah keadaan yang dinamakannya *knowledge economy*. *Knowledge economy* adalah kondisi kita sekarang yang merujuk pada cara hidup di mana untuk mendapatkan kemakmuran maka kita hidup dengan metode pembelajaran dan pengetahuan masa kini. Yang tidak disadari dengan metode pembelajaran dan pengetahuan masa kini adalah: manusia sebenarnya dipekerjakan oleh kaum kapitalis dunia pendidikan; dan lebih jauh lagi, manusia sebenarnya terasing (teralienasi) karena dia bekerja untuk sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya. Inilah ciri utama *knowledge economy*: (1) reorientasi sistem pendidikan seluruh negara untuk hasil yang berorientasi pada laba, (2) ini didapatkan dengan mengkomodifikasi komunikasi antar manusia, (3) teknologi digunakan untuk mengkomodifikasi manusia dan masyarakat. Dengan mengkomodifikasi, mengkomodifikasi dan mengkapitalisasi pengalaman dan pengetahuan orang-orang, maka *knowledge economy* tercipta.

Contoh mudah bagi komodifikasi manusia adalah ketika banyak orang menyatakan pendidikan di lembaga A atau B atau kurikulum tertentu adalah yang terbaik. “Orang banyak” yang dimaksud di atas melakukannya dengan sukarela, tanpa bayaran ketika dia mempromosikan lembaga pendidikan A dan B atau

kurikulum itu. Adapun contoh sederhana untuk keterasingan manusia dalam *knowledge economy* adalah sesuai dengan kasus dalam artikel ini, yaitu ketika para dosen harus mengikuti pengaturan administrasi kedosenan oleh pemerintah dan atau lembaga pendidikan (kampus) yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi dosen.

Diturunkan dari teori hiperkapitalisme Graham, didapat sebuah metode analisis yang disebutnya dengan istilah *discourse historical*. *Discourse historical* Graham adalah metode menganalisis teks, diskursus, sejarah, nilai-nilai sosial, yang telah dimediasi secara sosial, linguistik, ekologis dan teknologi. Dalam *discourse historical* Graham melihat gambaran-gambaran terwujud karena pengalaman berkomunikasi dengan basis bahasa, di mana media berperan di dalamnya. Di dalam pemikiran Graham, pembentukan nilai-nilai baru dapat terwujud lewat praktik bahasa, media dan komunikasi. Pemikiran Graham ini sebenarnya tak lain adalah terusan dari pemikiran Karl Marx yang pada masanya melihat buruh sebagai komoditi kaum kapitalis [4]. Diketahui Marx oleh pengikutnya disebut sebagai tokoh peletak dasar kajian kritis dalam keilmuan, khususnya keilmuan sosial. Graham tidak membuat grafis dalam teorinya, akan tetapi setelah menelaah dengan seksama maka penulis membuat alur pemikiran Graham yang merujuk Marx itu sebagai berikut:



**Gambar 1. Skema Pemikiran Philip W. Graham Dimulai dari Karl Marx**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Izin mengulang bahwa *discourse historical* Graham adalah metode menganalisis teks, diskursus, sejarah, nilai-nilai sosial, yang telah dimediasi secara sosial, linguistik, ekologis dan teknologi [5]. Di sini, kita dapat mengakomodir metode Graham dengan mengawali dari sebuah diskursus pendidikan tinggi Indonesia yang terkait dengan sejarah dan nilai-nilai sosial, dengan mengajukan pertanyaan “Apa masalah pendidikan tinggi Indonesia?” Pertanyaan ini penulis ajukan kepada “guru besar” terkait dengan praktik teknologi-informasi-komunikasi dewasa ini yang disebut dengan nama lucu-lucuan yaitu “Embah” *Google*. Mengapa bertanya kepada *Google*? Sesuai dengan metode *discourse historical* Graham, menelusuri jejak kajian kepada sistem berbasis teknologi adalah wajar saja, asalkan dapat ditemukan kemaslahatan berpikirnya.

Untuk menjawab pertanyaan di atas yang dilakukan pada bulan April 2023, maka *Google* menuntun kita untuk membaca pemikiran Marzuki Alie seorang pendidik yang juga tadinya seorang politisi dan pejabat tinggi negara. Ada enam akar masalah pendidikan tinggi Indonesia menurut orang yang paham luar-dalam pendidikan tinggi di Indonesia ini, yaitu: rendahnya kualitas pendidik, fasilitas pendidikan belum memadai, masalah efektivitas pendidikan, mahalnya biaya pendidikan, masalah pengangguran terdidik, masalah *link and match* antara mutu lulusan dengan kebutuhan organisasi kerja yang hendak menyerap lulusan tersebut.

Mari kita cek pertanyaan yang sama kepada “guru besar” teknologi-informasi-komunikasi yang sangat canggih dewasa ini, bernama “*ChatGPT*”. Inilah jawabannya: masalah aksesibilitas (terbatasnya jumlah pendidikan tinggi, dan terjadinya ketidakmerataan antara kota

dengan luar kota), kualitas pendidikan yang belum memuaskan, kurangnya keterampilan lulusan menghadapi dinamika kerja dan usaha, rendahnya riset dan inovasi, kurangnya keterlibatan industri dalam proses produksi pendidikan. Jawaban ini sejajar tingkatannya dengan analisis guru besar dalam arti yang sebenarnya (seorang manusia bergelar profesor) [6].

Mengingat Marzuki Alie menempatkan masalah pertama pendidikan tinggi Indonesia adalah terkait dengan rendahnya mutu pendidik atau dikenal dengan sebutan dosen, maka mari kita kembali bertanya kepada *Google*, dengan rangkaian pertanyaan: “Mengapa mutu dosen Indonesia rendah?” Penulis mencari, dan secara subjektif merasa tidak menemukan jawaban yang sangat memuaskan. Penulis lakukan teknik *paraphrase* pertanyaan, menjadi: “Apa masalah yang dihadapi oleh dosen perguruan tinggi di Indonesia?” Dan bertemulah tuntunan jawabannya, di mana *Google* mengarahkan pada berita yang menyampaikan pendapat Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI) di depan anggota DPR, bahwa ada empat masalah utama dosen: gaji atau kesejahteraan (gaji belum memadai), studi lanjut (dosen perlu studi lanjut tapi terkendala ini dan itu), birokrasi dan beban administrasi, publikasi internasional (ada kewajiban namun susah mewujudkannya) dan jejaring (yang kurang mendukung untuk mengembangkan diri) (5).

Bolehlah kita cek *ChatGPT* mengingat untuk pertanyaan pertama telah memberikan jawaban memuaskan. Untuk pertanyaan “Apa masalah yang dihadapi oleh dosen perguruan tinggi di Indonesia?” inilah lima jawaban *ChatGPT*: beban kerja yang tinggi, kurangnya waktu untuk penelitian, rendahnya dukungan dan fasilitas penelitian, keterbatasan pengembangan profesional, peningkatan

tekanan publikasi dan penilaian kinerja (6). Sekali lagi penulis terpesona dengan mutu jawaban *ChatGPT*. Dia sanggup bersaing dengan asosiasi dosen. Bagi penulis, analisisnya “kena” sekali.

Di dalam sebuah forum non-formal keilmiah, tepatnya dalam akun youtube bertajuk Mimbar Intelek, terungkap data dari narasumber yang berkomunikasi dengan profesornya di sebuah negara asing, di mana sang profesor berkata, “Saya kalau di Indonesia tidak akan bisa menjadi seorang profesor.” Mengapa? Masalahnya dia (profesor tersebut) tidak akan sanggup dengan beban dosen Indonesia yang harus berurusan dengan administrasi dan administrasi dan administrasi (7).

Selain kewajiban mengurus administrasi kinerja dosen yang memang menyita waktu dan membutuhkan ketekunan itu, dosen-dosen yang serius pun mengeluhkan lamanya penilaian administrasi yang dimaksud. Dosen berkeinginan regulasi-regulasi yang diproduksi oleh otoritas pendidikan bermutu baik dan proses kerja terkait regulasinya hendaknya dipercepat bukan memperlambat.

Bagi yang tidak memahami, dapatlah digambarkan duduk persoalan dari fenomena di atas dalam penjelasan berikut. Bahwa setiap akhir semester setiap dosen wajib memberikan laporan kinerjanya dalam sebuah sistem pelaporan khusus berbasis teknologi-informasi, yang kini bernama SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi) untuk sesuatu yang terkait dengan kepentingan BKD (Beban Kerja Dosen). Adapun dalam sistem SISTER ini sendiri telah dimintakan bahwa setiap selesai aktivitas akademik tertentu (pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) maka dosen harus memasukkan datanya ke SISTER. Aktivitas dalam SISTER ini tentunya tidak bisa disamakan dengan

aktivitas pelaporan setiap kali mengajar di kampus dosen yang bersangkutan yang terus menerus harus dilaporkan dosen setiap selesai beraktivitas. Kampus mempunyai sistem informasi akademik tersendiri, biasanya dikenal dengan istilah SIAKAD (Sistem Akademik). Adapun SIAKAD tidak terintegrasi dengan SISTER.

Yang patut diperhatikan, terjadi ketidakterhubungan dalam sistem-sistem informasi yang dikelola Kemdikbud-Ristek RI yang terkait dengan dosen. Sebagai contoh, sebelum laporan BKD ada di dalam SISTER seperti yang sudah berjalan dua tahun terakhir, maka dosen wajib memasukkan laporannya ke sebuah sistem informasi khusus sendiri dengan penginputan manual. Syukur kini hal yang dimaksud telah terintegrasi dalam SISTER. Namun, SISTER tidak sendiri. Jika seorang dosen selesai dengan sebuah aktivitas penelitian dan publikasinya, maka dosen itu harus memasukkannya lagi ke dalam sebuah sistem informasi bernama SINTA (*Science and Technology Index*). SINTA ini sejogjanya terintegrasi dengan SISTER, namun pada kenyataannya tidak terintegrasi, sehingga harus dilakukan input data secara manual. Bagi yang kurang cepat beradaptasi dengan teknologi informasi maka dia harus alih konsentrasi untuk belajar teknik *input* data di SINTA.

Jika seorang dosen ingin mendalami dunia penelitian keilmiah, maka dia harus membuka sebuah akun lagi, bernama ARJUNA (Akreditasi Jurnal Nasional). Di dalam ARJUNA, dosen dapat menemukan arsip-arsip keilmuan berbentuk buku, jurnal, dan publikasi lain yang relevan.

Apakah ini selesai? Belum. Nanti jika seorang dosen sudah memenuhi syarat kepangkatan akademik tertentu (Tenaga Pengajar ke Asisten Ahli dengan poin kumulasi 150, lalu ke Lektor berpoin 200

dan 300, lalu ke Lektor Kepala berpoin 400, lalu 550, lalu 700), dan selanjutnya ke profesor yang bermula dari poin 850, dan seterusnya) maka dia harus mengajukan kenaikan pangkatnya lewat sebuah sistem informasi bernama SIJALI (Sistem Informasi Jenjang jabatan Akademik). Di sini tentu dosen belajar sistem baru lagi. Dan jangan dilupakan yang telah disampaikan di atas bahwa ada birokrasi yang bekerja yang membutuhkan waktu yang kini syukurnya beberapa bulan saja (dulu bisa sampai setahun atau lebih).

Dosen di Indonesia diperlakukan seperti pegawai negeri, dimana kita dapat melihat pegawai negeri dalam proses kerja dan kenaikan pangkatnya memang membutuhkan waktu dan pengisian aplikasi serta prosedural tertentu.

Adapun pelaksanaan di pelaporan terakhir yaitu SIJALI, inilah yang dikeluhkan dosen-dosen pada April 2023. Untuk mengakomodir kebijakan dari Kemenpan RB maka Kemdikbud-Ristek RI merilis kebijakan agar dosen-dosen Indonesia mengisi angka kreditnya secepat kilat di SIJALI. Tentunya ini adalah untuk kebaikan dosen sendiri supaya tertata kinerjanya pada negara, dan Kemdikbud-Ristek RI meyakini SIJALI sudah terintegrasi dengan SISTER.

Karena meyakini SIJALI sudah terintegrasi dengan SISTER, menurut Kemdikbud-Ristek RI, dosen tinggal melakukan proses pelaporan sederhana saja dengan catatan jika SISTER-nya sudah rajin diisi oleh dosen. Dalam kenyataannya, pada saat itu data SIJALI tidak dapat menarik data SISTER. Sekeras apapun Kemdikbud-Ristek RI menyatakan ini telah terintegrasi, dalam kenyataannya tidak terintegrasi. Dan yang menimbulkan masalah jika dosen belum pernah melaporkan apapun lewat SIJALI, sebutlah itu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, maka dosen harus mengisi

manual seluruh data pengajaran per semester selama 5 tahun terakhir itu, termasuk data penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Jika dikatakan yang lima tahun itu keteteran memang demikianlah kenyataannya. Akan tetapi dia masih beruntung. Kenapa? Karena ada yang 10 tahun belum mengisinya, bahkan ada yang 15 dan lebih dari 20 tahun, karena dia abai dengan kenaikan pangkatnya selama proses waktu yang dimaksud.

Terlepas dari fenomena yang terakhir, yang dosennya abai dengan proses kenaikan pangkat jabatan akademiknya, akan tetapi mengisi data di SIJALI dalam waktu seminggu untuk data bertahun-tahun yang dilakukan di tengah aktivitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, menjelang libur lebaran, memang terasa mengganggu. Maka datanglah perlawanan dari dosen kepada Kemdikbud-Ristek RI, di mana akhirnya Kemdikbud-Ristek RI menyesuaikan aturannya dengan pembatalan bagi dosen non-PNS.

Sekarang, bagaimana menghubungkan fenomena pendidikan tinggi Indonesia di atas dengan teori-teori dari Philip W. Graham?

Bagi penulis inilah fenomena hiperkapitalisme dan *knowledge economy* sebagaimana disitir oleh Graham. Bahwa dunia pendidikan tinggi bukannya dilayani oleh Kemdikbud-Ristek RI untuk memudahkan pemangku kepentingannya, yang dalam hal ini terkait dosen [7]. Graham menyinggung tentang alienasi. Dalam kenyataannya, dosen memang telah teralienasi melalui kehadiran beban-beban administrasi yang semestinya mudah saja di zaman sekarang.

Penyebutan *mudah* tentunya *lebih* dan bahkan *paling* dipahami oleh yang paling berwenang untuk urusan ini yaitu Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, Teknologi

(Mendikbud-Ristek) RI. Mengingat, sebelum menjadi menteri, beliau sudah dikenal sukses dengan bisnisnya yang justru mampu menyederhanakan sistem informasi berbasis teknologi di mana khalayak yang ditujunya (konsumen dan seluruh operator yang terkait dengan bisnisnya) mudah dan berkenan menggunakan aplikasi bisnisnya, sehingga bisnisnya sangatlah sukses.

Kini setelah lebih dari tiga tahun menjabat posisi pemimpin di lembaga publik, beliau belum bisa memaksakan integrasi sistem-sistem informasi ini. Ini sesuatu yang berkebalikan dengan yang terjadi di bisnis yang telah beliau tinggalkan. Sebuah upaya integrasi sistem, tentu saja akan memudahkan pada dosen Indonesia dalam melakukan laporan dan administrasi kedosenannya kepada negara.

Kembali ke pemikiran Philip W. Graham dengan hiperkapitalisme dan *knowledge economy*-nya, Graham menunjukkan bahwa nilai-nilai baru dapat dibentuk dengan aktivitas mediasi yang melibatkan bahasa dan media massa [8].

Memang demikianlah yang terjadi. Di mana, perlawanan para dosen yang disampaikan di atas melibatkan media massa dan media sosial dalam artian dua hal:

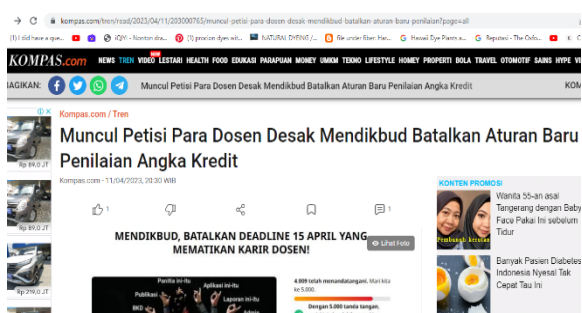
- munculnya berita-berita di media massa Indonesia tentang perlawanan kaum dosen Indonesia April 2023 terkait kebijakan Kemdikbud-Ristek RI, di mana perlawanan dimulai di media sosial dan berlanjut menjadi pemberitaan media massa;
- munculnya opini-opini dosen yang dipublikasikan oleh media massa Indonesia terkait beratnya beban kerja dosen terkait administrasi.

Gambar-gambar berikut menunjukkan publikasi dari fenomena yang sedang dikaji ini:



**Gambar 2. Petisi Dosen Indonesia kepada Mendikbud-Ristek RI**

Gambar 2 adalah gambar petisi berjudul “Mendikbud, Batalkan Deadline 15 April yang Mematikan Karir Dosen”, diinisiasi oleh Benny Sutiarto. Petisi ini muncul dan beredar di media sosial seperti Instagram, twitter, grup-grup media sosial dosen, yang dalam waktu singkat ditandatangani oleh ribuan dosen. [9]



**Gambar 3. Kolase Berita Perlawanan Dosen akan Kebijakan Kemdikbud-Ristek RI**

Gambar 3 adalah penggambaran berita yang muncul di dua media nasional terkemuka terkait perlawanan dosen atas kebijakan Kemdikbud-Ristek RI.

Berita-berita di media massa yang mengiringi riuh-sesak dosen di ruang kerjanya dan di berbagai media sosial dosen demi mengejar tenggat waktu yang diminta oleh Kemdikbud-Ristek RI, rupanya mendapatkan perhatian dari Kemdikbud-Ristek RI. Pada tanggal 13-5-2023 Kemdikbud-Ristek RI merilis surat bernomor 0275/E/DT.04.01/2023 yang membatalkan kebijakan bagi dosen untuk mengisi pengajuan angka kreditnya segera di SIJALI, yang dikatakan ini lebih ditujukan kepada dosen yang berstatus ASN (aparatur sipil negara) [10]. Selanjutnya pada tanggal 23-5-2023, media terkemuka Indonesia, Kompas, mempublikasikan opini dari Prof. Sulistyowati Irianto dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang berhasil menyimpulkan dan menyuarakan permasalahan dosen Indonesia yang sebenarnya di-treatment sebagai buruh. Tentunya di sini tidak dimaksud merendahkan profesi dan status buruh, namun ini hendak menunjukkan bahwa sebenarnya komodifikasi manusia yang telah diamati oleh Marx pada abad ke-19 rupanya masih berlangsung di Indonesia setelah hampir dua abad sejak Marx mengangkat isu pemanfaatan manusia oleh manusia lain yang lebih berkuasa. Dan kini dosen Indonesia sedang merasakannya.



**Gambar 4. Opini Dosen Berjudul “Buruh Dosen”, Harian Kompas, 23 April 2023**

## SIMPULAN

Artikel ini menggunakan pemikiran Philip W. Graham, seorang pemikir kajian ekonomi-politik-media untuk membedah permasalahan pendidikan tinggi Indonesia. Pisau kajian yang digunakan adalah teori Graham terkait hiperkapitalisme, ekonomi pengetahuan, metode *discourse historical*.

Hampir semua yang disampaikan oleh Philip W. Graham dalam hiperkapitalisme dan ekonomi pengetahuan terwujud dan dapat dipergunakan ketika membedah masalah pendidikan tinggi Indonesia yang terkait dengan beban kerja dosen. Betapa dosen telah dikomodifikasi dan teralienasi lewat beban-beban administrasinya yang seharusnya mudah tetapi ternyata tidak mudah. Penulis artikel bahkan berani menduga menterinya pun teralienasi karena di bawah kepemimpinannya sistem-sistem informasi berbasis teknologi tidak dapat terintegrasi dengan baik, padahal di lembaga berbeda itu bukan sesuatu yang sulit baginya.

Di samping itu metode Graham *discourse historical* dapat dipergunakan ketika komunikasi, bahasa, dan media dapat dipergunakan dalam upaya mediasi persoalan hiperkapitalisme dan ekonomi pengetahuan. Tertera di dalam sub-bahasan Hasil dan Pembahasan apa yang terjadi dan bagaimana peran media dalam mediasi persoalan.

Hanya satu yang belum jelas, yaitu apakah nilai baru dalam pendidikan tinggi Indonesia khususnya yang terkait dengan beban administrasi dosen akan muncul, dalam arti kehadiran sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi. Yang ada saat ini adalah sebuah keputusan melegakan dari Kemdikbud-Ristek RI terkait pembatalan pengisian angka kredit kinerja dosen pada bulan April 2023. Apakah selanjutnya nilai-nilai baru dalam artian Kemdikbud-Ristek RI semakin

mempermudah pekerjaan dosen dalam bentuk integrasi sistem informasi berbasis teknologi, itulah yang ditunggu-tunggu. Penulis berkeyakinan bahwa Kemdikbud-Ristek RI yang di dalamnya juga ada dosen-dosen yang berkarya sebagai pejabat dan tenaga ahli akan mampu menelurkan nilai-nilai baru dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak berorientasi proses kerja administrasi negara yang rumit, bertele-tele, namun dalam bentuk kemudahan demi kemudahan. Organisasi swasta yang saat ini operasionalisasinya sedang ditinggalkan sementara waktu oleh Pak Menteri Pendidikan sanggup memudahkan pemangku kepentingannya, yang oleh karenanya mari kita yakini hal ini pun akan mampu diwujudkan oleh Pak Menteri di sisa waktu kepemimpinannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Kusumaningsih dan R. Riyono, "Pengaruh Motivasi, Pendidikan dan Pelatihan Penulisan Bahan Ajar terhadap Kinerja Dosen," *Stab. J. Manag. Bus.*, vol. 2, no. 2, 2019, doi: 10.26877/sta.v2i2.5155.
- [2] E. Handayani, P. P. Sari, dan M. J. Islami, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh UMKM pada Masa Pandemi COVID-19," *J. Komunika J. Komunikasi, Media dan Inform.*, vol. 10, no. 2, 2021, doi: 10.31504/komunika.v10i2.4622.
- [3] D. R. Tobergte and S. Curtis, "HypercapitalismAn Investigation Into The Relationship Between Language, New Media, and Social Perceptions of Value," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, 2013.
- [4] A. Rowcroft, *Karl marx*. 2021.
- [5] A. D. Handoyo and Zulkarnaen, "Faktor-faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia," *Pros. Semin. Nas.*, vol. 1, no. 1, 2019.



- [6] E. L. Hill-Yardin, M. R. Hutchinson, R. Laycock, and S. J. Spencer, "A Chat(GPT) about The Future of Scientific Publishing," *Brain, Behavior, and Immunity*, vol. 110. 2023, doi: 10.1016/j.bbi.2023.02.022.
- [7] K. K. Choong and P. W. Leung, "A Critical Review of the Precursors of the Knowledge Economy and Their Contemporary Research: Implications for the Computerized New Economy," *J. Knowl. Econ.*, vol. 13, no. 2, 2022, doi: 10.1007/s13132-021-00734-9.
- [8] U. Khumairoh, "Dampak Konglomerasi Media terhadap Industri Media Massa dan Demokrasi Ekonomi Politik di Era Konvergensi Media," *Muqoddima J. Pemikir. dan Ris. Sociol.*, vol. 2, no. 1, 2021, doi: 10.47776/mjprs.002.01.05.
- [9] C. Nurmalita and M. A. Wibowo, "Pengembangan Media Ajar PETISI atau Pendidikan Anti-Korupsi," *Mimb. Pendidik.*, vol. 3, no. 1, 2018, doi: 10.17509/mimbardik.v3i1.10636.
- [10] Admin, "Undangan Kegiatan Tindak Lanjut PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023," <https://lldikti3.kemdikbud.go.id/v6/2023/04/14/undangan-kegiatan-tindak-lanjut-permenpanrb-nomor-1-tahun-2023/>, Apr. 14, 2023. .